

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Adjie, Habib, 2011, *Merajut Pemikiran dalam dunia Notaris & PPAT*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003, *Penelitian Metode Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Edisi Revisi IV, PT. Rineka Cipta, Jakarta

Chomzah, Achmad, Ali, 2004, *Hukum Agraria (Pertanahan Indonesia)*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Hadikusuma, Hilman, 2013, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, CV. Mandarmaju, Bandung.

Hadjon, M. Philipus dkk, 2002, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Harsono, Boedi, 2008, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agrarian, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

Mustofa, 2017, *Tuntunan Pembuatan Akta-akta PPAT*, Karya Media, Yogyakarta.

Pardosi, Gustav, 2008, *PPAT Sebagai Pejabat Umum*, Citra Ilmu, Jakarta.

Parlindungan, A.P, 1999, *Pendaftaran Tanah Indonesia (Berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 Dilengkapi dengan Peraturan Jabatan Pembuat Akta Tanah (PP No. 37 Tahun 1998))*, CV. Mandar Maju, Bandung.

Peranginangin, Effendi, 1994, *Hukum Agraria di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rubaie, Achmad, 2007, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayu Media, Malang.

Soekanto, Soerjono, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jakarta.

_____, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI PRESS, Jakarta.

Soelarman, Brontosaelarno, *Aspek Teknis dan Yuridis Pendaftaran Tanah Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997*, Makalah seminar Nasional Kebijakan Baru Pendaftaran Tanah dan Pajak-Pajak yang Terkait, Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Badan Pertanahan Nasional, Yogyakarta.

Sumardjono, Maria S.W., 1997, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

2. Karya Ilmiah:

Faisal, Hakim, Andi, 2014, “Kewajiban PPAT Membuat Laporan Bulanan”, *Laporan Praktik Kerja Lapangan*, Sekolah Vokasi Program Diploma 3 Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Giri, Anggara, Made, 2013, “Pelaksanaan Peralihan Hak milik Atas Tanah Karena Jual Beli Di Hadapan Camat Sebagai PPAT Sementara Setelah Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Di Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung”, *Jurnal*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Mouw, Yolanda, 2018, “Peran Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar Dalam Melakukan Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Tugas Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Safii, Muhammad, 2014, “Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Yogyakarta”, *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

3. Perundang-undangan:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah dan Benda-benda Yang Ada di Atasnya;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 Juncto PMA Nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan PPAT;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah 37 Tahun 1998 (telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 23 Tahun 2009);

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2017 tentang Ujian, Magang, Pengangkatan dan Perpanjangan Usia Masa Jabatan;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan

Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

Keputusan Bersama Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Direktur Jenderal Pajak Nomor: SKB 2 Tahun 1998_KEP-179/PJ./1998

Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Nomor 112/KEP-4.1/IV/2017